



POHON KINERJA



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. GAMBARAN UMUM	1
1.1. Informasi/Data.....	1
A. Informasi/Data Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1
B. Informasi/Data Tentang Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan.....	5
a) Nilai Produksi Perikanan Budidaya.....	7
b) Nilai Produksi Perikanan Tangkap.....	8
c) Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam.....	10
II. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	12
2.1. Urusan Lingkungan Hidup.....	12
2.2. Urusan Kelautan Perikanan	12
III. POHON KINERJA.....	13
3.1. OUTCOME TINGKAT III.....	13
A. Hasil (<i>Outcome III</i>) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja	13
B. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor/CSF) Outcome III	13
C. Diagram Outcome I.....	13
3.2. OUTCOME TINGKAT II.....	14
A. Hasil (<i>Outcome II</i>) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja	14
B. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor/CSF) Outcome II	14
C. Diagram Outcome II.....	14
3.3. OUTCOME TINGKAT I.....	16
A. Hasil (<i>Outcome I</i>) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja	16
B. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor/CSF) Outcome I	16
C. Diagram Outcome I.....	19
• Urusan Lingkungan Hidup.....	19
• Urusan Kelautan dan Perikanan	21
3.4. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional	22
1. Urusan Lingkungan Hidup.....	22
2. Urusan Kelautan dan Perikanan	26
3.5. Identifikasi Potensi Crosscutting	28
1. Urusan Lingkungan Hidup.....	28
2. Urusan Keautan dan Perikanan	28
3.6. Diagram Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan.....	29

3.7. Merumuskan Indikator Kinerja.....	32
1. Indikator Urusan Lingkungan Hidup	32
2. Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan	41

I. GAMBARAN UMUM

1.1. Informasi/Data

A. Informasi/Data Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di Kabupaten Kebumen, IKLH ditetapkan menjadi salah satu indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam RPJMD tahun 2021-2026. Persentase ketercapaian IKLH tersebut digunakan sebagai salah satu Sasaran Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan (DLHKP) Kabupaten Kebumen.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Nitrat, Fecal Coli, Transparansi, Total Nitrogen dan Klorofil; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan non hutan.

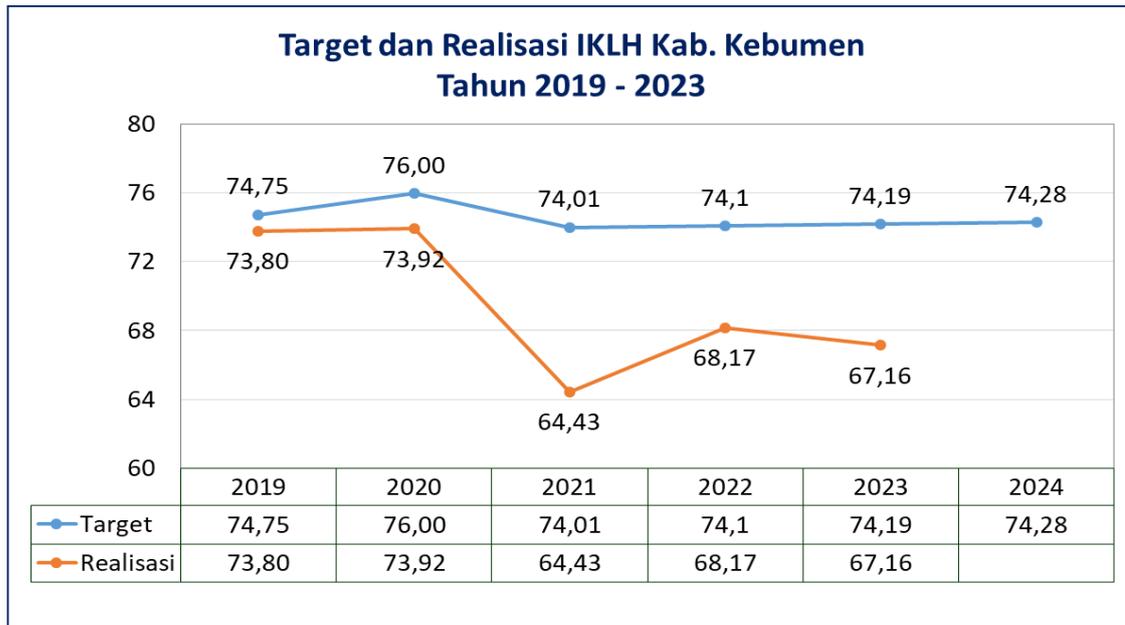
Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung IKLH Kabupaten/Kota adalah:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

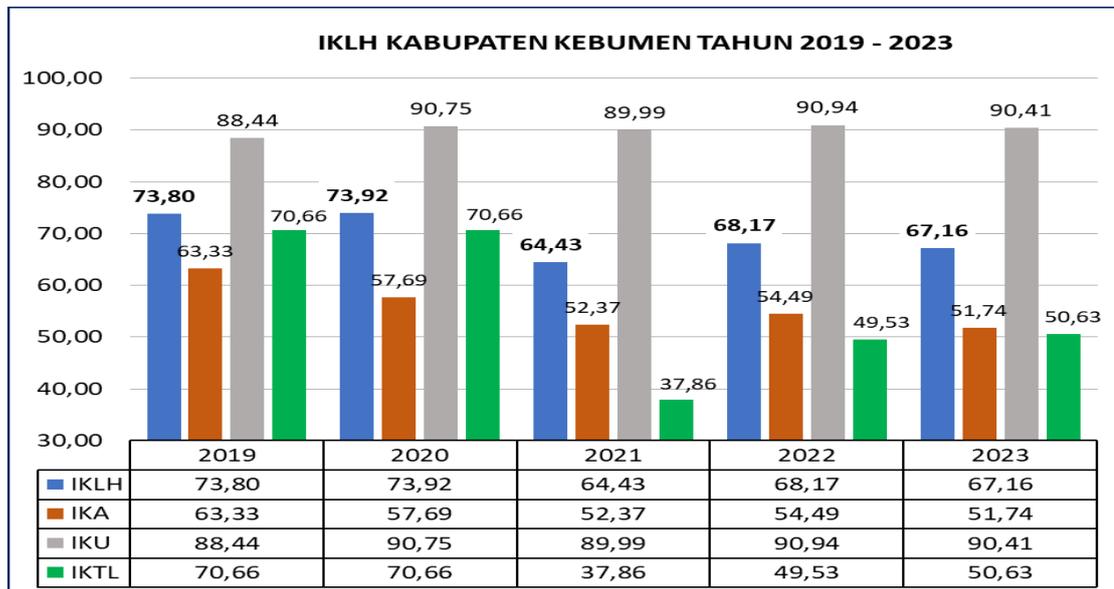
IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA : Indeks Kualitas Air
IKU : Indeks Kualitas Udara
IKL/IKTL : Indeks Kualitas Lahan/ Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Dasar perhitungan IKLH diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

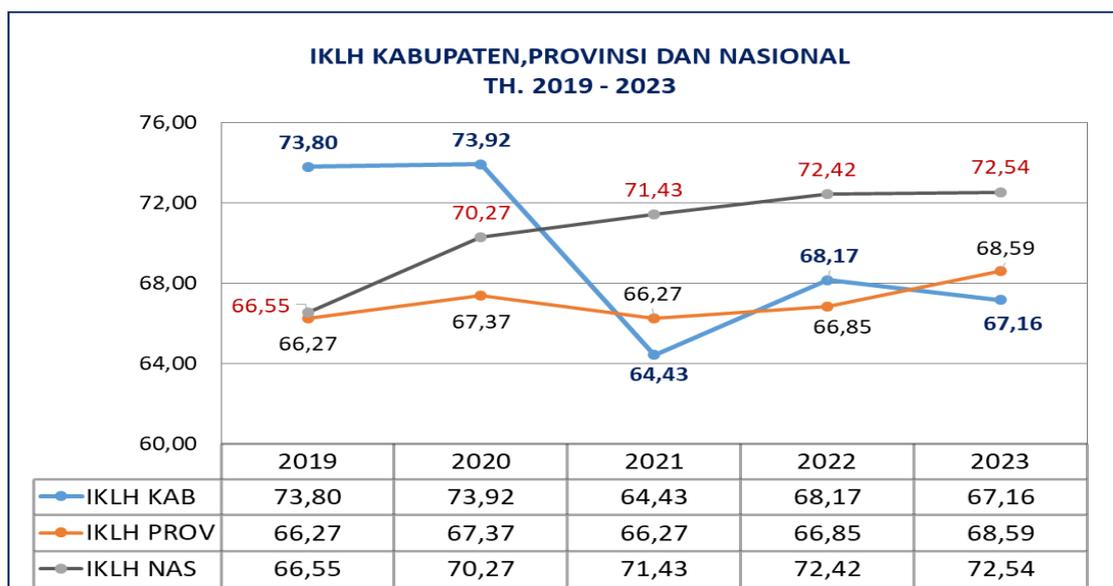
Grafik 1.1 Target dan Realisasi IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023



Grafik 1. 2 Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023



Grafik 1. 3 Target dan Realisasi IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023



Adapun Predikat IKLH adalah sebagai berikut :

- < 40 = waspada
- 40 - 50 = sangat kurang
- 50 - 60 = kurang baik
- 60 – 70 = cukup baik
- 70 – 80 = baik
- > 80 = sangat baik

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Capaian IKLH Kabupaten Kebumen selalu di atas/lebih besar dari pada capaian IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan Pada tahun 2021, nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Provinsi maupun Nasional karena faktor IKTL yang menurun drastis. Namun demikian hasil perolehan IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebesar 64,43 atau masuk kategori **“CUKUP BAIK”**.

Tahun 2022 capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Nasional namun masih diatas capaian IKLH Provinsi yaitu sebesar 68,17 dan masih termasuk kategori **“CUKUP BAIK”**. Tahun 2023 capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Nasional dan IKLH Provinsi yaitu

sebesar 67,16 dan masih termasuk kategori **“CUKUP BAIK”**. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan metode laporan IKLH sejak tahun 2021 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi online dari kementerian LHK. Dari hasil pengujian tahun 2023 melalui aplikasi online tersebut terdapat penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Indeks Respon Lingkungan Hidup

Sejak tahun 2020 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Setiap tahun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh rapor yang di dalamnya berisi tentang angka indeks, tolok ukur posisi daerah tersebut dalam wilayah provinsi dan nasional, indeks respon dan rekomendasi untuk perbaikan masing masing indeks. Informasi ini selain akan disampaikan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai salah satu faktor perhitungan dana bagi hasil daerah, juga kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk evaluasi kinerja lingkungan Pemerintah Daerah. Rapor tersebut juga akan diberikan kepada Pemerintah Daerah, dengan tujuan memperkuat posisi dinas yang membidangi sektor lingkungan hidup dan kehutanan untuk bernegosiasi dengan gubernur, bupati atau walikota, serta lembaga legislatif daerah pada saat penyusunan anggaran. Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib mengisi beberapa parameter Indeks Respon pada aplikasi IKLH sejak tahun 2023, adapun rapor pengisian Indeks Respon Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2023 yang berisi tiga parameter yaitu Langit Biru, Kali Bersih dan Indonesia Hijau.

Adapun pemenuhan terhadap indikator dari ketiga parameter diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Persentase Pemenuhan Data Dukung Indeks Respon Lingkungan Hidup Kab. Kebumen Tahun 2023

No.	Parameter	% Pemenuhan Data Dukung ke Aplikasi IKLH
1.	Langit Biru	96%
2.	Kali Bersih	90%
3.	Indonesia Hijau	100%
4.	Gambut Lestari	-

B. Informasi/Data Tentang Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan (DLHKP) Kabupaten Kebumen yang kedua adalah Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan.

Adapun Rumus penghitungannya yaitu :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan} = \frac{(\text{nilai produksi usaha kelautan dan perikanan tahun } (n) \text{ dalam rupiah} - \text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun 2020 sebagai baseline dalam rupiah})}{\text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun 2020 sebagai baseline dalam rupiah}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel 1.2 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Perikanan Tangkap (Rp)	Perikanan Budidaya (Rp)	Pengolahan Hasil Perikanan (Rp)	Garam (Rp)	Nilai Produksi (Rp) *	Realisasi (%)	Target Rens-tra (%)	Capaian (%)	Ket.
1	2019	208.409.454.306	117.603.172.000	10.141.695.000	244.860.000	336.399.181.306	94,26	0	0	
2	2020	196.258.500.419	130.669.387.000	6.464.341.000	578.480.000	333.970.708.419	92,85	0	0	
3	2021	212.457.910.669	135.191.978.000	29.218.550.300	623780000	377.492.218.969	13,03	2,50	521,26	Data dasar Th. 2020
4	2022	173.982.608.774	138.501.573.000	37.715.056.339	599757500	350.798.995.613	5,04	3,00	167,96	Data dasar Th. 2020
5	2023	174.876.849.000	152.416.467.300	34.490.000.000	417.000.000	362.200.316.300	8,97	4,50	199,4	Data dasar Th. 2020

Sebagai contoh perhitungan dari tabel diatas kita memperoleh angka realisasi

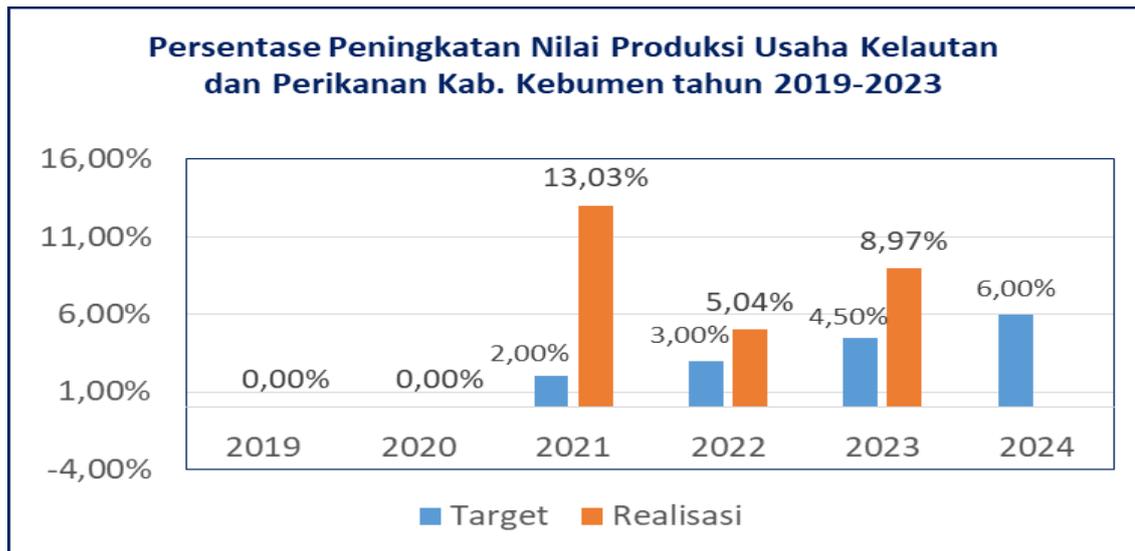
Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan tahun 2023 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} \\ \text{peningkatan nilai} \\ \text{produksi usaha} \\ \text{kelautan dan} \\ \text{perikanan} \end{aligned} = \frac{(\text{Rp. } 362.200.316 - \text{Rp. } 333.970.708.419)}{(\text{Rp. } 333.970.708.419)} \times 100\%$$

Dari Tabel diatas jika dimasukkan ke dalam rumus maka diperoleh Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar 8,97 % dari tahun dasar 2020. Dai target peningkatan 4,5 % maka diperoleh capaian 199,40% dengan predikat “Baik Sekali”

Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

Grafik 1.4 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023



Secara rinci capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan yang ke-2 (dua) yaitu “Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan” dengan indikator sasaran “Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja pendukung, yaitu:

- a. Nilai Produksi Perikanan Budidaya

- b. Nilai Produksi Perikanan Tangkap
- c. Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam

a) Nilai Produksi Perikanan Budidaya

Sebagai contoh Indikator Program Perikanan Budidaya adalah Realisasi peningkatan Nilai produksi perikanan budidaya (dalam rupiah) dihitung dari data dasar 2020 dengan target peningkatan 15% pada tahun 2023

Tabel 1.3 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya

No.	Indikator	Satuan	2023			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Peningkatan Nilai Produksi perikanan budidaya	%	15,00	16,64	110,95%	Sangat Baik	• LKjIP DLHKP Kab.Kebumen 2023
2.	Nilai Produksi perikanan budidaya	Milyar Rupiah	150,27	152,42	101,43%	Sangat Baik	• LKjIP DLHKP Kab.Kebumen 2023

Indikator Program Perikanan Budidaya adalah Realisasi peningkatan Nilai produksi perikanan budidaya (dalam rupiah) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang digambarkan grafik sebagai berikut :

Grafik 1. 4 Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Budidaya tahun 2019 – 2023



Pada tahun 2023 target nilai produksi perikanan budidaya (dalam rupiah) sebesar 15% (dari angka dasar tahun 2020) pada indikator Program Pengelolaan Budidaya Perikanan atau setara dengan target Perolehan Rp.

150.269.795.050,-. Sedangkan realisasi nilai produksi perikanan budidaya tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 152.416.467.300,- atau setara dengan peningkatan 16,64% sehingga capaian persentase peningkatan sebesar 110,95% dengan predikat “Sangat Baik”.

b) Nilai Produksi Perikanan Tangkap

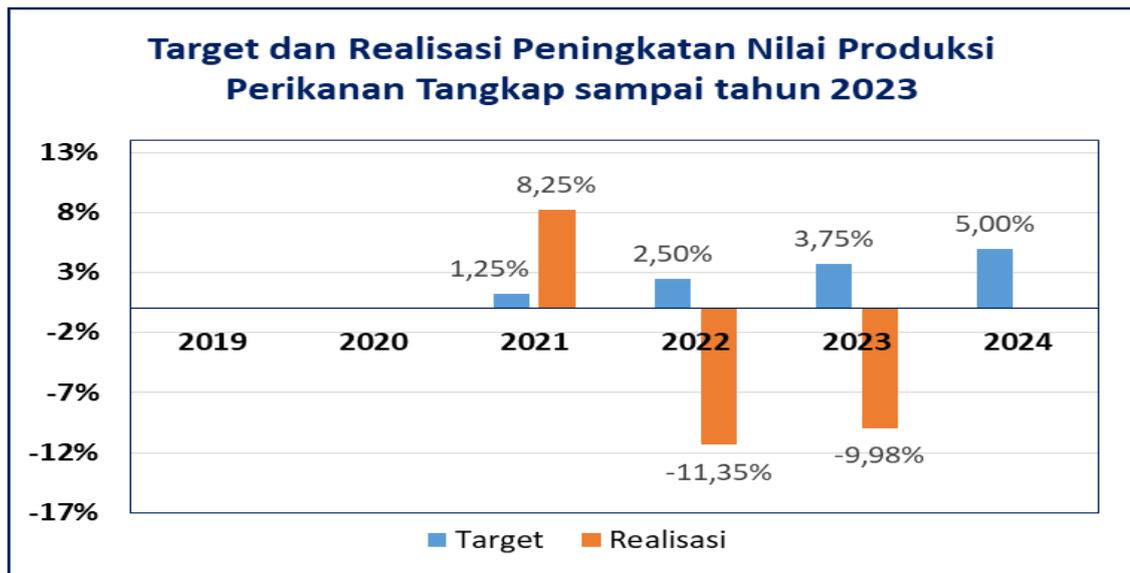
Kendati Indikator Program hanya untuk menghitung tonase produksi yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap dalam kg atau ton, namun karena belum adanya target di Renstra atau Renja untuk capaian PDRB sektor perikanan tangkap yang mendukung IKU Urusan, maka jika diterapkan untuk menghitung peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	2023			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Peningkatan Nilai Produksi perikanan tangkap	%	3,75	-9,98	-266,13%	Sangat Kurang	• LKjIP DLHKP Kab.Kebumen 2023
2.	Nilai Produksi perikanan tangkap	Milyar Rupiah	203,62	176,66	86,76%	Baik	• LKjIP DLHKP Kab.Kebumen 2023

Adapun target dan realisasinya dapat dilihat pada Grafik berikut:

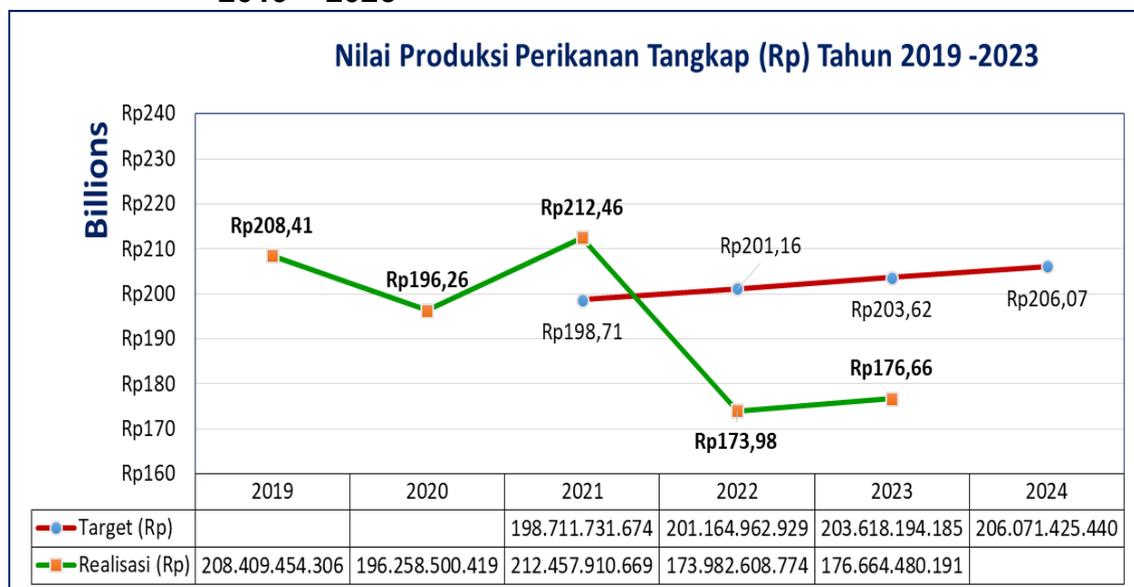
Grafik 1.1 Target dan Realisasi Nilai Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sampai dengan tahun 2023



Dari grafik diatas terlihat adanya penurunan nilai produksi (Rupiah) pada tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya hasil tangkapan yang bernilai jual rendah dalam jumlah besar yaitu ubur-ubur yang memiliki porsi sekitar 43,99% dari tonase produksi perikanan tangkapan perikanan laut pada tahun 2023. Sedangkan harga jual ubur-ubur sekitar Rp.900,-/ Kg.

Adapun capaian kinerja nilai produksi perikanan tangkap (Rp) sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini ;

Grafik 1.6 Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Tangkap tahun 2019 – 2023



c) Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam

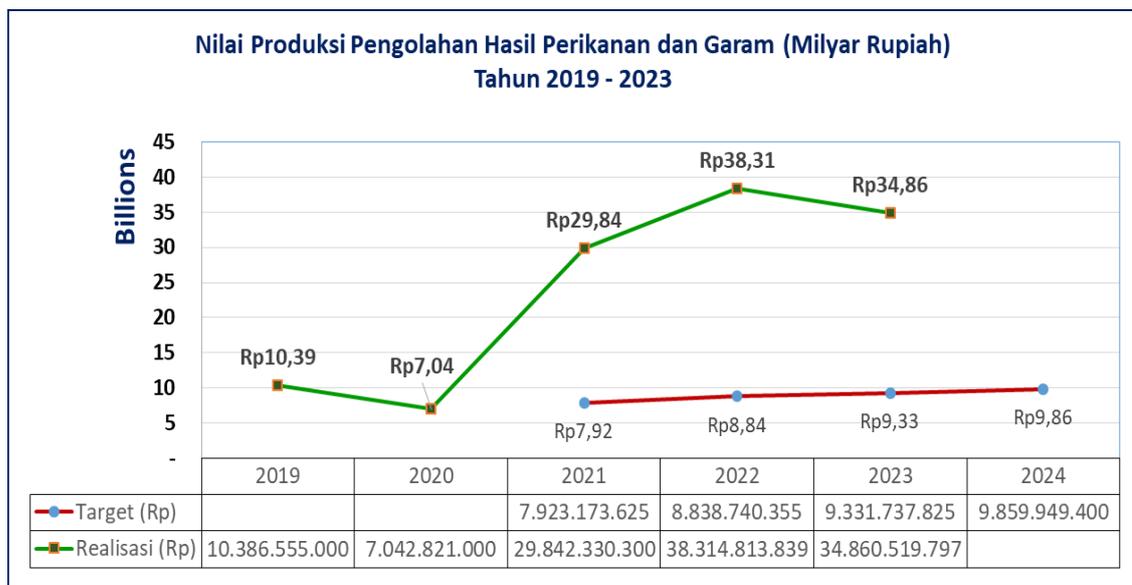
Indikator Program Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 1.215,93% dengan predikat **“Sangat Baik”**.

Tabel 1. 5 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	2023			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	%	32,50%	395,18%	1.215,93%	Sangat Baik	• LKjIP DLHKP Kab.Kebumen 2023
2.	Nilai Produksi Usaha Perikanan	Milyar Rupiah	9,33	34,86	373,57%	Sangat Baik	• LKjIP DLHKP Kab.Kebumen 2023

Hasil Indikator kinerja Jumlah Nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebagai berikut :

Grafik. 1.7 Target dan Realisasi Nilai Produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (Milyar Rupiah) tahun 2019 – 2023.



Pada Tahun 2020 Nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam memiliki capaian Rp. 7.042.821.000, dan pada tahun 2021 ditargetkan kenaikan sebesar 12,5%, dengan perolehan nilai produksi sebesar Rp 29.842.330.300,-

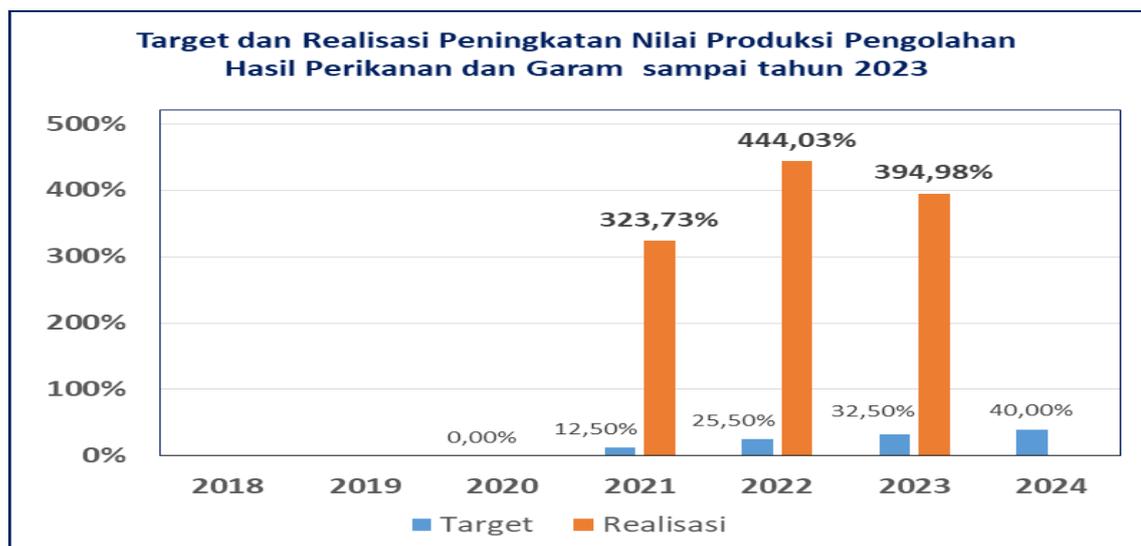
dengan peningkatan sangat tinggi sebesar Rp 22.799.509.300,- atau realisasi peningkatannya adalah 323,73%. Capaian pada tahun 2021 adalah 2.589,82% dengan predikat sangat baik.

Pada tahun 2022 peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan dan garam ditargetkan sebesar 25,50 % setara dengan Rp. 8.838.740.355,- dengan realisasi nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam dalam rupiah sebesar Rp. 38.314.813.839,- atau setara peningkatan 444,03% dari tahun acuan Renstra (tahun 2020) sehingga Capainya 1.741,28% dengan predikat “Sangat Baik”.

Pada tahun 2023 peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan dan garam ditargetkan sebesar 32,50% setara dengan Rp. 9.331.737.825,- dengan realisasi nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam dalam rupiah sebesar Rp. 34.860.519.797,- atau setara peningkatan 394,98% dari tahun acuan Renstra (tahun 2020) sehingga Capainya 1.215,32 % dengan predikat “Sangat Baik”.

Realisasi dan Target Nilai produksi garam sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 1.8 Capaian kinerja jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sampai dengan tahun 2023.



Untuk capaian kinerja pengolahan hasil perikanan dan garam (Rp) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami capaian yang sangat baik dengan hasil diatas yang diharapkan yaitu diatas 100%.

II. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen saat ini adalah sebagai berikut ;

2.1. Urusan Lingkungan Hidup

1. Belum tercapainya target indeks kualitas lingkungan hidup yang ditargetkan dalam rencana strategis. Indeks ini dipengaruhi oleh indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
2. Belum maksimalnya kerjasama yang baik dari segi penyuluhan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan dari organisasi perangkat daerah maupun dari desa/ kelurahan untuk meningkatkan kemandirian sampah oleh pihak masyarakat dalam rangka menurunkan sumber pencemar.

2.2. Urusan Kelautan Perikanan

1. Kurangnya prasarana pendaratan ikan dan sandaran kapal yang aman sehingga mengurangi trip melaut dalam waktu satu tahun karena sangat tergantung oleh cuaca (Ukuran kapal dibawah 5 GT)
2. Produktivitas Garam yang masih rendah, karena belum semua kelompok Kugar aktif
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk hasil olahan ikan karena mahalnya bahan baku untuk pengolahan hasil perikanan

III. POHON KINERJA

3.1. OUTCOME TINGKAT III

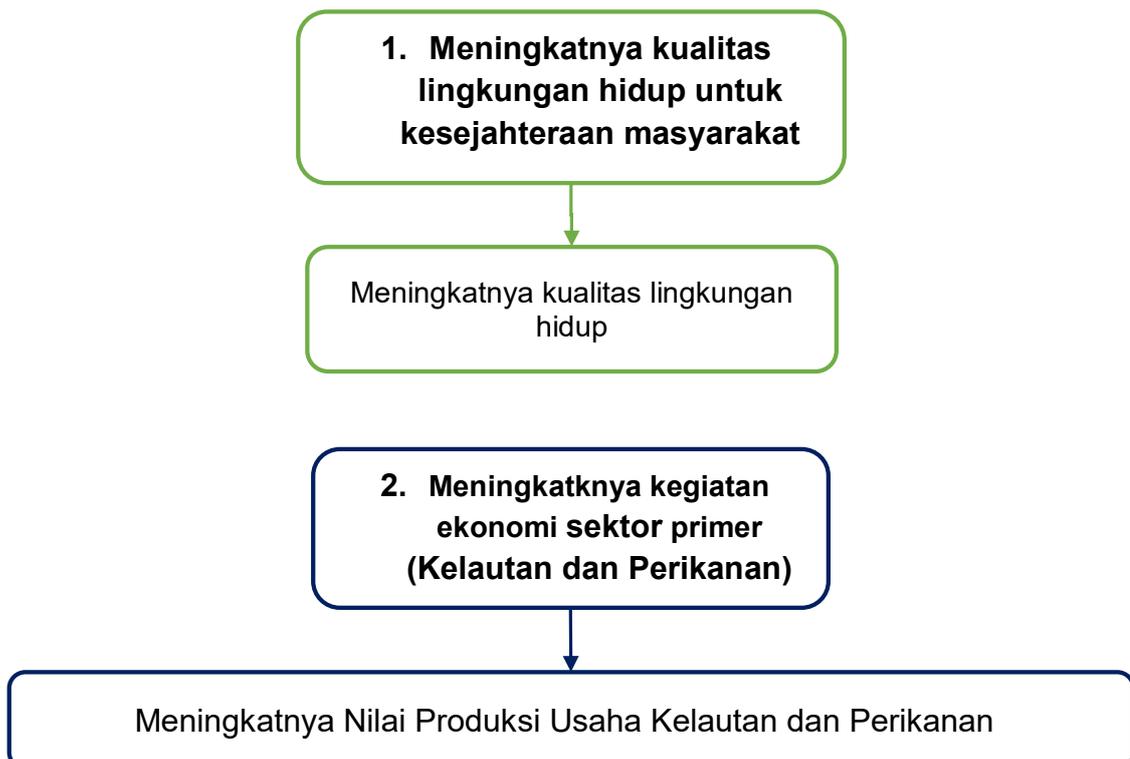
A. Hasil (*Outcome III*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer

B. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor/CSF) Outcome III

CSF OUTCOME III	KONDISI YANG DIPERLUKAN
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer (Kelautan dan Perikanan)	Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan

C. Diagram Outcome I



3.2. OUTCOME TINGKAT II

A. Hasil (Outcome II) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan

B. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor/CSF) Outcome II

CSF OUTCOME I	KONDISI YANG DIPERLUKAN
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup2. Meningkatnya pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan3. Meningkatnya desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup4. Meningkatnya fasilitasi penghargaan lingkungan hidup5. Tertanganinya Pengaduan masyarakat terkait Lingkungan Hidup6. Meningkatnya jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R7. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup8. Meningkatnya penanganan keanekaragaman hayati daerah9. Meningkatnya kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3
2. Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Tangkap2. Meningkatnya Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan3. Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Perikanan4. Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Budidaya

C. Diagram Outcome II

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup
2. Meningkatnya pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan
3. Meningkatnya desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup
4. Meningkatnya fasilitasi penghargaan lingkungan hidup
5. Tertanganinya Pengaduan masyarakat terkait Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
7. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
8. Meningkatnya penanganan keanekaragaman hayati daerah
9. Meningkatnya kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3

2. Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan

1. Meningkatnya jumlah produksi dan nilai Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian
3. Meningkatnya Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Usaha Perikanan
4. Meningkatnya Jumlah Prouksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya

3.3. OUTCOME TINGKAT I

A. Hasil (Outcome I) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

- **Urusan Lingkungan Hidup**

1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup
2. Meningkatnya pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan
3. Meningkatnya desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup
4. Meningkatnya fasilitasi penghargaan lingkungan hidup
5. Tertanganinya Pengaduan masyarakat terkait Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
7. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
8. Meningkatnya penanganan keanekaragaman hayati daerah
9. Meningkatnya kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3

- **Urusan Kelautan dan Perikanan**

1. Meningkatnya jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap
2. Meningkatnya Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan
3. Meningkatnya Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Usaha Perikanan
4. Meningkatnya Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya

B. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor/CSF) Outcome I

1. Urusan Lingkungan Hidup

CSF OUTCOME I	KONDISI YANG DIPERLUKAN
1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	1. Meningkatnya Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun)
2. Meningkatnya pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	2. Meningkatnya penyusunan rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha
3. Meningkatnya desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	3. Meningkatnya jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata

CSF OUTCOME I	KONDISI YANG DIPERLUKAN
4. Meningkatnya fasilitas penghargaan lingkungan hidup	4. Meningkatnya jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup
5. Tertanganinya Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	5. Terfasilitasinya penanganan Pengaduan masyarakat terkait Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	6. Meningkatnya Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah
7. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7. Meningkatnya Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	8. Meningkatnya Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota
	9. Meningkatnya Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8. Meningkatnya penanganan keanekaragaman hayati daerah	10. Meningkatnya Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kehati
9. Meningkatnya kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	11. Meningkatnya Jumlah fasilitas dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3

2. Urusan Kelautan dan Perikanan

CSF OUTCOME I	KONDISI YANG DIPERLUKAN
1. Meningkatnya jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap	1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
	2. Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan,

CSF OUTCOME I	KONDISI YANG DIPERLUKAN
	pendidikan, pelatihan dan pemantauan
	3. Meningkatnya Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional
	4. Meningkatnya Persentase kapal perikanan yang berijin
2. Meningkatnya Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	5. Meningkatnya Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan
3. Meningkatnya Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Usaha Perikanan	6. Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	7. Meningkatnya produksi dan nilai pengolahan hasil perikanan dan produksi garam
4. Meningkatnya Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	8. Meningkatnya Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan
	9. Meningkatnya produksi perikanan budidaya

C. Diagram Outcome I

- **Urusan Lingkungan Hidup**

1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup

1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup

1. Meningkatnya Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun

2. Meningkatnya pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan

Meningkatnya pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan

2. Meningkatnya penyusunan rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha

3. Meningkatnya desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup

Meningkatnya desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup

3. Meningkatnya jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata

4. Meningkatnya fasilitasi penghargaan lingkungan hidup

Meningkatnya fasilitasi penghargaan lingkungan hidup

4. Meningkatnya jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup

5. Tertanganinya Pengaduan masyarakat terkait Lingkungan Hidup

**Tertanganinya Pengaduan masyarakat
terkait Lingkungan Hidup**

5. Terfailitasnya penanganan Pengaduan masyarakat
terkait Lingkungan Hidup

6. Meningkatnya jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

**Meningkatnya jumlah sampah yang
terkurangi melalui 3R**

6. Meningkatnya Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah

7. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

**Meningkatnya
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup**

7. Meningkatnya Jumlah kegiatan pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

8. Meningkatnya Jumlah Kegiatan
Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan lingkungan hidup kab/kota

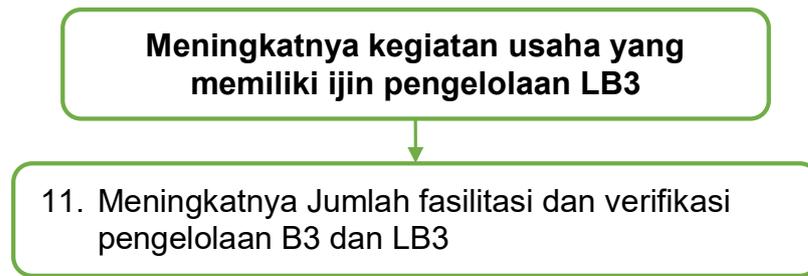
9. Meningkatnya Jumlah kegiatan pemulihan
pencemaran dan/atu kerusakan lingkungan
hidup

8. Meningkatnya penanganan keanekaragaman hayati daerah

**Meningkatnya penanganan
keanekaragaman hayati daerah**

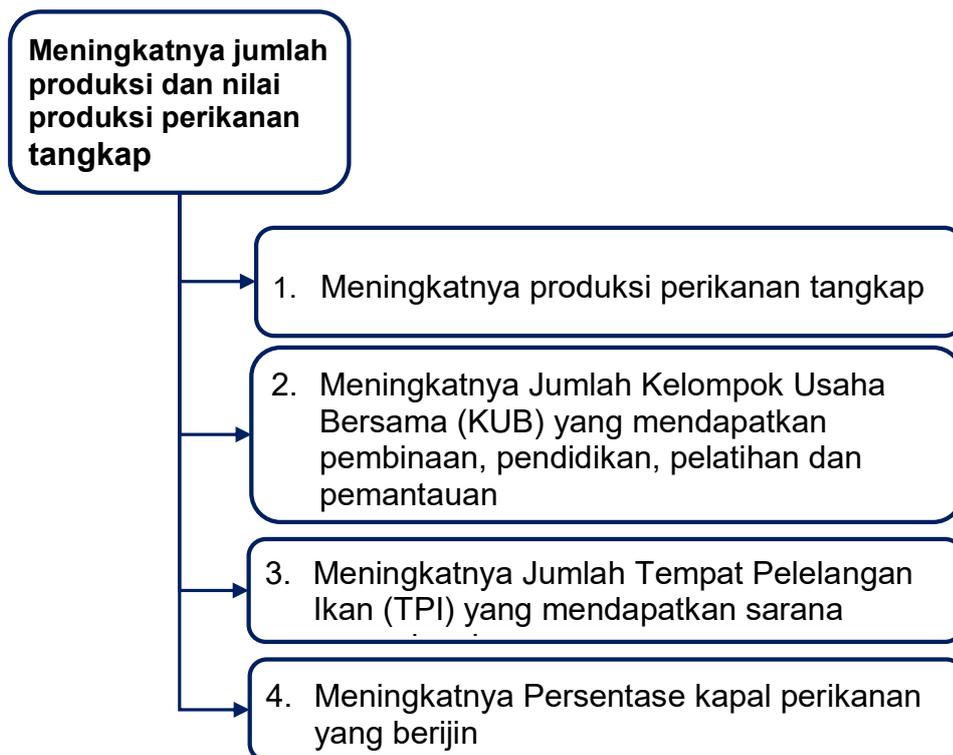
10. Meningkatnya Jumlah dokumen perencanaan
dan pengelolaan kehati

9. Meningkatnya kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3

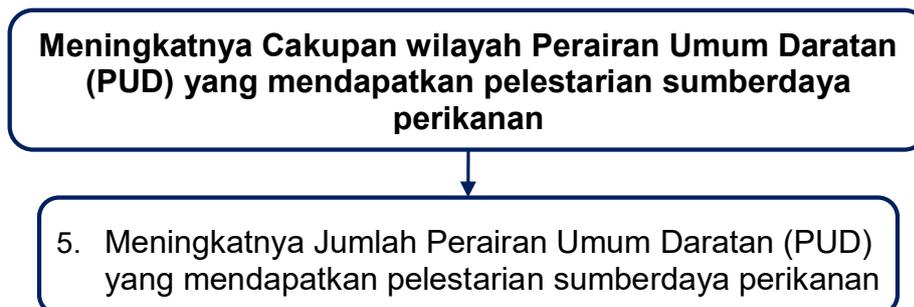


- **Urusan Kelautan dan Perikanan**

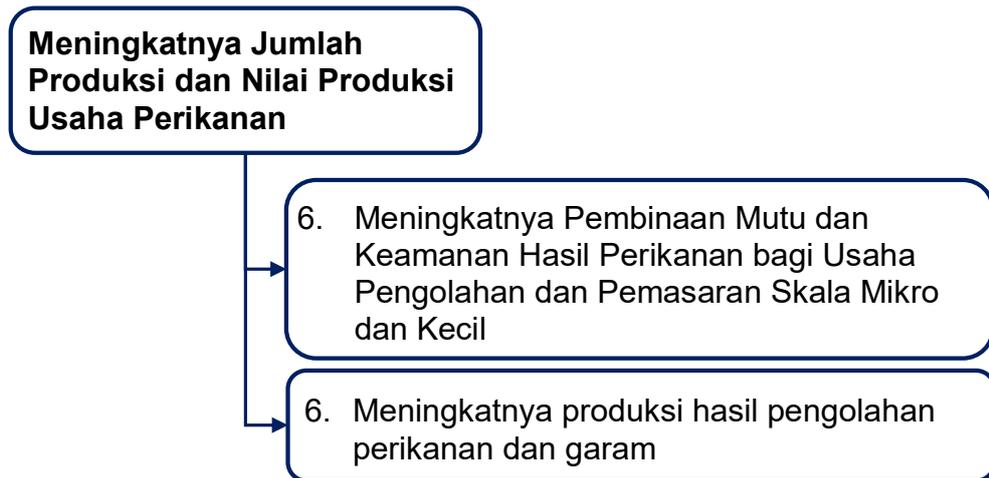
1. Meningkatnya jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap



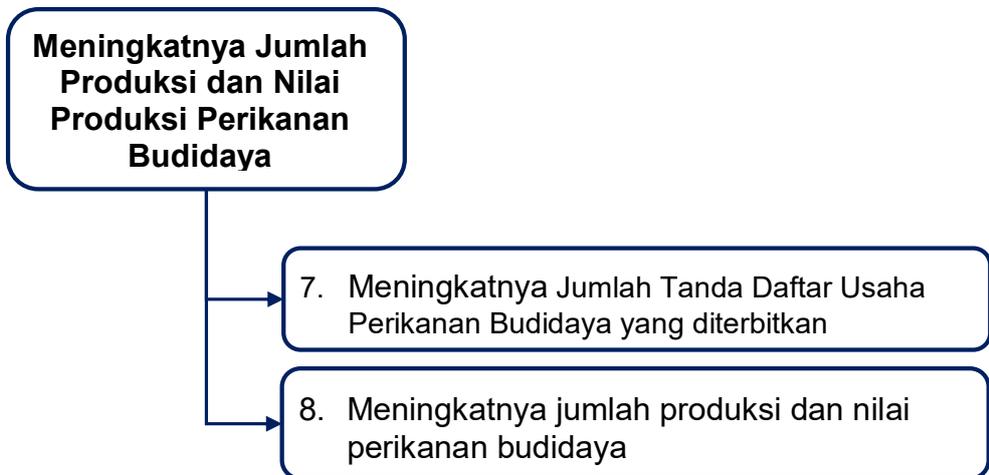
2. Meningkatnya Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan



3. Meningkatnya Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Usaha Perikanan



4. Meningkatnya Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya



3.4. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

1. Urusan Lingkungan Hidup

CSF OUTPUT	KONDISI YANG DIPERLUKAN
1. Meningkatnya Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	1. Tersusunnya dokumen/ laporan/ review/ penelitian terkait dokumen yang bersifat Pengendalian terhadap RPPLH dan Rancangan/ Sosialisasi Perda RPPLH
	2. Tersusunnya dokumen yang memuat RPPLH dan Perubahan muatan dalam Dokumen RPPLH sesuai kondisi yang ada

CSF OUTPUT	KONDISI YANG DIPERLUKAN
2. Meningkatnya penyusunan rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	3. Meningkatnya Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan (UKL UPL, AMDAL) dan Ijin PPLH (IPLC)
	4. Terlaksananya peningkatan Jumlah kegiatan unit usaha yang diawasi
3. Meningkatnya jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	5. Terlaksananya peningkatan jumlah desa yang dilakukan pendampingan penyusunan Perdes
	6. Terlaksananya peningkatan Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
4. Meningkatnya jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	7. Terlaksananya peningkatan jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup
5. Meningkatnya fasilitasi penanganan Pengaduan masyarakat terkait Lingkungan Hidup	8. terselesaikannya fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti dan ditangani
	9. terselesaikannya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
6. Meningkatnya Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah	10. Meningkatnya Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R
	11. Terlaksananya peningkatan Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,

CSF OUTPUT	KONDISI YANG DIPERLUKAN
	Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
	12. Jumlah dokumen Jakstrada/review capaian jakstrada (Terpenuhinya laporan pengelolaan persampahan oleh kepala daerah dalam aplikasi SIPSN)
	13. Meningkatnya Jumlah lokasi pendampingan pengelolaan TPST/pembentukan bank sampah (Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah, TPS3R, Unit Pengolah Sampah dan TPST)
	14. Terlayannya penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
7. Meningkatnya Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	15. Terlaksananya peningkatan Jumlah sarpras pencegahan pencemaran/sarpras laboratorium lingkungan
	16. Terlaksananya peningkatan Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca
	17. Meningkatnya pelayanan laboratorium lingkungan hidup
8. Meningkatnya Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota	18. Terlaksananya peningkatan Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan
	19. Meningkatnya Jumlah Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dibangun dan meningkatnya

CSF OUTPUT	KONDISI YANG DIPERLUKAN
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
9. Meningkatnya Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	20. Meningkatnya Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dari aktifitas industri kecil dan kegiatan usaha lainnya
	21. Meningkatnya jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
	22. Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
10. Meningkatnya Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kehati	23. Meningkatnya Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati atau Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	24. Terlaksananya peningkatan Jumlah penataan dan pemeliharaan RTH
	25. Meningkatnya Jumlah Kegiatan pendampingan kelembagaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) daerah
	26. Terlaksananya peningkatan jumlah Sarana dan Prasarana keanekaragaman Hayati yang Dikelola
11. Meningkatnya Jumlah fasilitasi dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3	27. Meningkatnya Jumlah fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3
	28. Meningkatnya Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3

2. Urusan Kelautan dan Perikanan

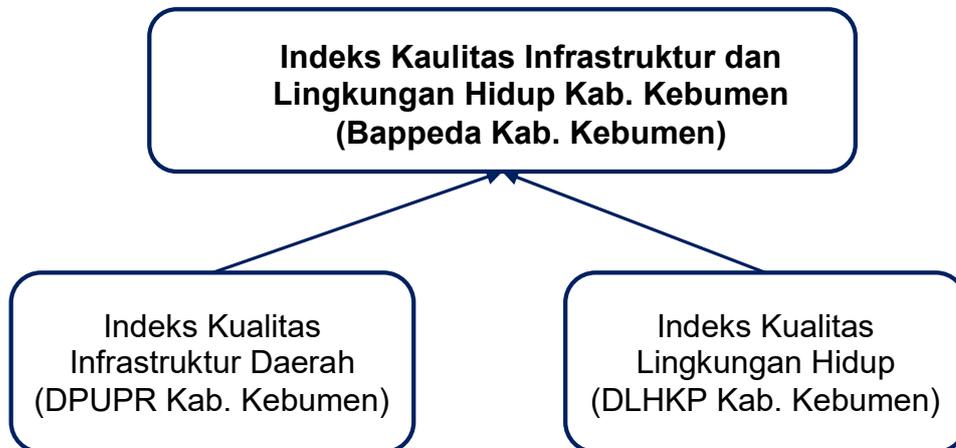
CSF OUTPUT	KONDISI YANG DIPERLUKAN
1. Meningkatnya jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap	1. Meningkatnya Jumlah Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun/ direhabilitasi
	2. Meningkatnya Jumlah fasilitasi sarana usaha perikanan tangkap untuk nelayan
2. Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3. Meningkatnya Kelompok Nelayan atau perorangan yang mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan
	4. Meningkatnya Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan
3. Meningkatnya Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	5. Meningkatnya Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional
4. Meningkatnya Persentase kapal perikanan yang berijin	6. Meningkatnya Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang diterbitkan
5. Meningkatnya Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	7. Meningkatnya Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan dan terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) pada PUD
6. Menigkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	8. Meningkatnya Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) dan kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) serta unit usaha pengolahan hasil perikanan dan garam yang mendapatkan pembinaan

CSF OUTPUT	KONDISI YANG DIPERLUKAN
7. Meningkatnya produksi dan nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam	9. Meningkatnya Jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN untuk meningkatnya Angka Konsumsi Makan Ikan (AKI) pada masyarakat
	10. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi
8. Meningkatnya Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	11. Meningkatnya Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan oleh Kab/ Kota
9. Meningkatnya jumlah produksi dan nilai produksi perikanan budidaya	12. Meningkatnya Jumlah prasarana pembudidayaan ikan kabupaten yang dibangun/ direhabilitasi
	13. Meningkatnya Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan
	14. Meningkatnya Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidayaan ikan
	15. Meningkatnya Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan
	16. Meningkatnya Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan Tambak Dinas yang mendapatkan sarana operasional

3.5. Identifikasi Potensi Crosscutting

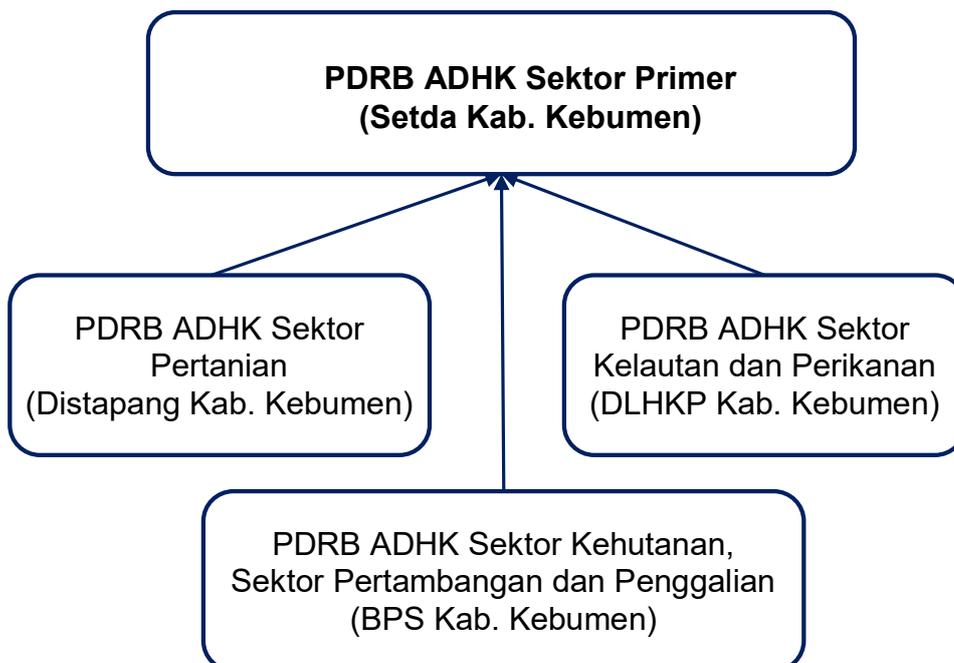
1. Urusan Lingkungan Hidup

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kebumen
2. BAPPEDA Kabupaten Kebumen



2. Urusan Keautan dan Perikanan

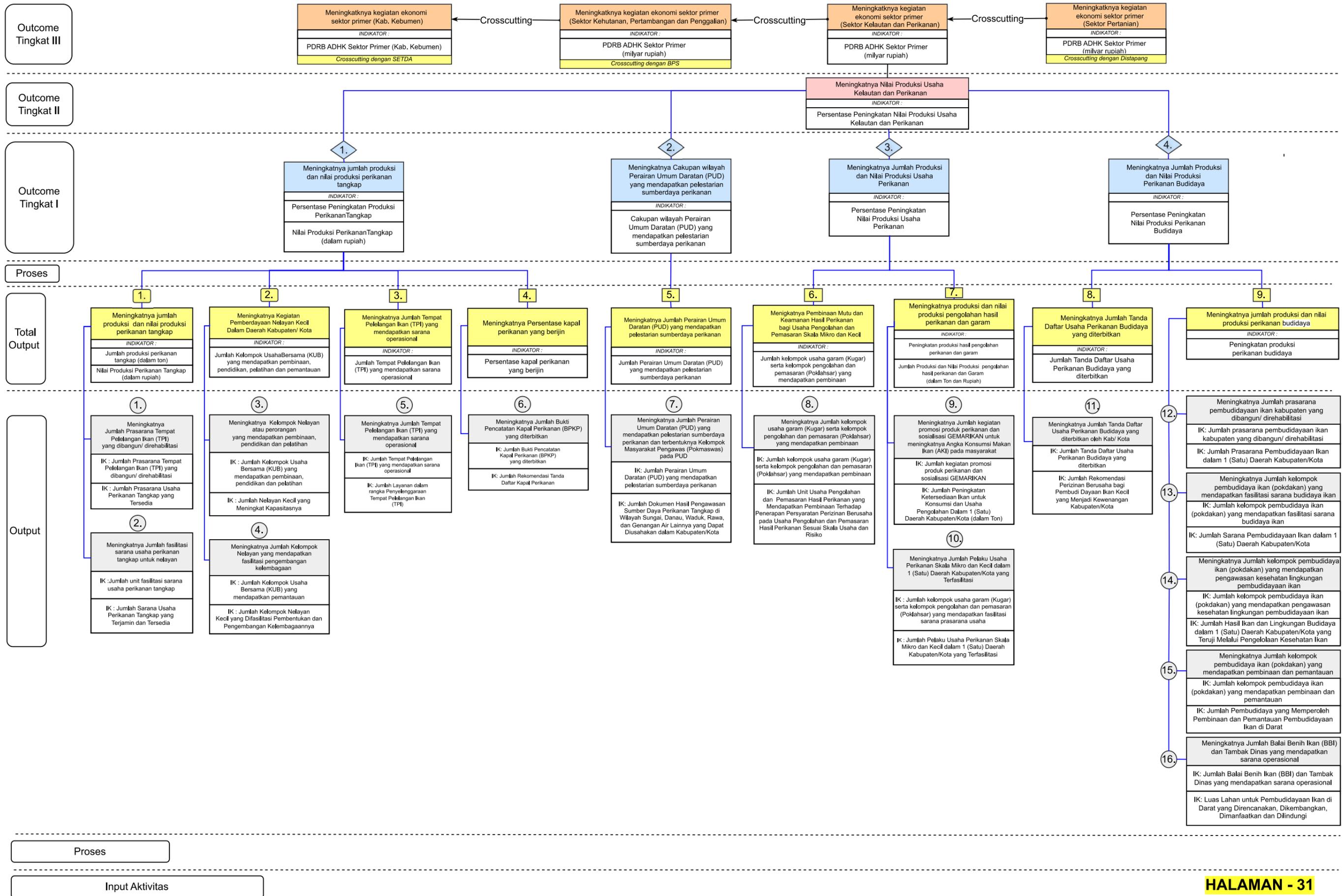
1. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
2. Badan Pusat Statistika Kabupaten Kebumen



3.6. Diagram Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan

Adapun Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada diagram pada halaman berikut ini :

2. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



3.7. Merumuskan Indikator Kinerja

1. Indikator Urusan Lingkungan Hidup

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	
			Meningkatnya Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun		Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	
				Tersusunnya dokumen/ laporan/ review/ penelitian terkait dokumen yang bersifat Pengendalian terhadap RPPLH dan Rancangan/ Sosialisasi	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (IKPLHD)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Perda RPPLH		
				Tersusunnya dokumen yang memuat RPPLH dan Perubahan muatan dalam Dokumen RPPLH sesuai kondisi yang ada	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (D3TLH/RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi
		Meningkatnya pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan			Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	
			Meningkatnya penyusunan rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha		Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	
				Meningkatnya Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan (UKL UPL, AMDAL) dan Ijin PPLH (IPLC)	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan (UKL UPL, AMDAL) dan Ijin PPLH (IPLC)
		Meningkatnya desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup			Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata		Jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	
				Terlaksananya peningkatan jumlah desa yang dilakukan pendampingan penyusunan Perdes	Jumlah desa yang dilakukan pendampingan penyusunan perdes	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH
				Terlaksananya peningkatan Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
		Meningkatnya fasilitaasi penghargaan lingkungan hidup			Persentase fasilitaasi penghargaan lingkungan hidup	
			Meningkatnya jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup		Jumlah titik pantau penilaian penghargaan lingkungan hidup	
				Terlaksananya peningkatan jumlah titik pantau dan	Jumlah titik pantau penilaian penghargaan	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				penghargaan lingkungan hidup	lingkungan hidup	Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
		Tertanganinya Pengaduan masyarakat terkait Lingkungan Hidup			Persentase penanganan Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	
			Terfasilitasi penanganan Pengaduan masyarakat terkait Lingkungan Hidup		Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	
				Terselesainya fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti dan ditangani	Jumlah fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani
				Terselesainya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
		Meningkatnya jumlah sampah yang berkurang melalui 3R			Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah		Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah	
				Meningkatnya Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R	Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
				Terlaksananya peningkatan Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
				Jumlah dokumen Jakstrada/review capaian jakstrada (Terpenuhinya laporan pengelolaan persampahan oleh kepala daerah dalam aplikasi SIPSN)	Jumlah dokumen Jakstrada/review capaian jakstrada	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan
				Meningkatnya Jumlah lokasi pendampingan pengelolaan TPST/pembentukan bank sampah (Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah, TPS3R, Unit	Jumlah lokasi pendampingan pengelolaan TPST/pembentukan bank sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pengolah Sampah dan TPST)		
				Terlaksananya Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah Barat/TIMUR)	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah Barat/TIMUR)	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
				Terlaksananya peningkatan Jumlah sarpras pencegahan pencemaran/sarpras laboratorium lingkungan	Jumlah sarpras pencegahan pencemaran/sarpras laboratorium lingkungan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Terlaksananya peningkatan Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca	Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya pelayanan laboratorium lingkungan hidup	Jumlah bulan pelayanan laboratorium lingkungan hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
			Meningkatnya Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota	
				Terlaksananya peningkatan Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan	Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
				Meningkatnya Jumlah Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dibangun dan meningkatnya Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah IPAL industri kecil yang dibangun	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
			Meningkatnya Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atu kerusakan		Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atu kerusakan lingkungan hidup	

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			lingkungan hidup			
				Meningkatnya Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dari aktifitas industri kecil dan kegiatan usaha lainnya	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan limbah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan
				Meningkatnya jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi pembinaan, sosialisasi dan pendampingan konservasi lingkungan, kampung iklim, forum pegiat lingkungan/forum DAS/mangroove dan sarpras tanaman konservasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
				Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah fasilitasi pembinaan/sosialisasi dan rencana aksi/demplot pelestarian sumber daya genetik dan HCPSN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
		Meningkatnya penanganan keanekaragaman hayati daerah			Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	
			Meningkatnya Jumlah dokumen		Jumlah dokumen perencanaan dan	

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			perencanaan dan pengelolaan kehati		pengelolaan kehati	
				Meningkatnya Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati atau dokumen Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati	Jumlah Dokumen Perencanaan RTH
				Terlaksananya peningkatan Jumlah penataan dan pemeliharaan RTH	Jumlah bulan penataan dan pemeliharaan RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Jumlah Kegiatan pendampingan kelembagaan Keakeragaman Hayati (Kehati) daerah	Jumlah pendampingan kelembagaan kehati daerah	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keakeragaman Hayati
				Terlaksananya peningkatan jumlah Sarana dan Prasarana keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
		Meningkatnya kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3			Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	
			Meningkatnya Jumlah fasilitasi dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3		Jumlah fasilitasi dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3	

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan B3	Jumlah fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Meningkatnya Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3	Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3

2. Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer (Sektor Kelautan dan Perikanan)					PDRB ADHK Sektor Primer (milyar rupiah)	
	Meningkatnya Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan				Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap			Persentase Peningkatan Produksi PerikananTangkap	Nilai Produksi PerikananTangkap (dalam rupiah)
			Meningkatnya jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap (dalam ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (dalam rupiah)
				Meningkatnya Jumlah Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun/ direhabilitasi	Jumlah Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun/ direhabilitasi	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia
				Meningkatnya Jumlah fasilitas sarana usaha perikanan tangkap untuk nelayan	Jumlah unit fasilitas sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia
			Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kelompok UsahaBersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan	
				Meningkatnya Kelompok Nelayan atau perorangan yang mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pemantauan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya
			Meningkatnya Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional		Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	
				Meningkatnya Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
			Meningkatnya Persentase kapal perikanan yang berijin		Persentase kapal perikanan yang berijin	
				Meningkatnya Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang diterbitkan	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan
		Meningkatnya Cakupan wilayah Perairan Umum			Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan				
			Meningkatnya Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan		Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	
				Meningkatnya Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan dan terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) pada PUD	Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Usaha Perikanan			Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	
			Meningkatnya Pembinaan Mutu		Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta	

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan	
				Meningkatnya Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko
			Meningkatnya produksi dan nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam		Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan (dalam Ton) Jumlah Produksi Garam (dalam Ton) Jumlah Nilai Produksi pengolahan hasil perikanan (dalam Rupiah) Jumlah Nilai Produksi Produksi Garam (dalam Rupiah)
				Meningkatnya Jumlah	Jumlah kegiatan promosi	Jumlah Peningkatan

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN untuk meningkatnya Angka Konsumsi Makan Ikan (AKI) pada masyarakat	produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN	Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dalam Ton)
				Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan fasilitasi sarana prasarana usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi
		Meningkatnya Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya			Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan		Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	
				Meningkatnya Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan oleh Kab/ Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya		Peningkatan produksi	

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			jumlah produksi dan nilai produksi perikanan budidaya		perikanan budidaya	
				Meningkatnya Jumlah prasarana pembudidayaan ikan kabupaten yang dibangun/ direhabilitasi	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan kabupaten yang dibangun/direhabilitasi	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidayaan ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidayaan ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
				Meningkatnya Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

OUTCOME III	OUTCOME II	OUTCOME I	TOTAL OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan Tambak Dinas yang mendapatkan sarana operasional	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan Tambak Dinas yang mendapatkan sarana operasional	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi

Mengetahui :



Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen

Drs. Masep Nurdiana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 199311 1 001